

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2020. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan: Rapat-Rapat Kreditor*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hadi Shubhan. 2019. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan Cetakam Keenam*. Kencana. Jakarta
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Nyoman A. Martana. 2016. *Buku Ajar Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Bagian Hukum Acara Universitas Udayana. Bali.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan. 2003. *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Serlika Aprita. 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: (Perspektif Teori)*. Setara Press. Malang.
- Suparji. 2017. *Kepailitan*. UAI Press. Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zainal Asikin. 2019. *Hukum Dagang Edisi Kedua*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.

JURNAL

Acep Rohendi. 2020. *Perdamaian dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang antara Debitur dengan Para Kreditur*. SELISIK. Vol. 6 (2).

Agitha Putri Andany Hidayat, Anita Arfiana. 2021. *Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Poros Hukum Padajaran. Vol. 3 (1).

Arumi Riezky Sari, Iwan Erar Joesoef. 2020. *Peran Kurator dalam Penanganan Kepailitan: Lambatnya Pelaksanaan Keputusan Kepailitan*. National Confrence on Law Studies (NCOLS). Vol. 2 (1).

Bagus Sujatmiko, Anita Arfiana. 2015. *Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal Akbat Kepailitan Perusahaan Terbuka ditinjau dari Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan Indonesia*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 (2).

Catur Irianto. 2015. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jurnal Hukum Peradilan. Vol. 4 (3).

Freisy Maria Kukus. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kurator dalam Perkara kepailitan*. Lex Privatum. Vol. III (2).

Ibrahim Ahmad. 2018. *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review. Vol. 1 (1). hlm. 16.

Ivan Harsono, Paramita Pranangtyas. 2019. *Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer*. NOTARIUS. Vol. 12 (2).

Jamal Wiwoho. 2014. *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 43 (1).

Kornelius Benuf, Muhammad Azhar. 2020. *Metode Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7(1).

- Linda Firdawaty. 2013. *Kewenangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. ASAS. Vol. 5 (1).
- Marva Yodana Ashila Rashid, dkk. 2021. *Analisis Putusan PKPU pada PT Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)*. Jurnal Commerce Law. Vol. 1 (1).
- Putra Halomoan Hsb. 2015. *Tinjauan Yuridis tentang Upaya-Upaya Hukum*. Yurisprudencia. Vol. 1 (1).
- Syahrul Sitorus. 2018. *Upaya Hukum dalam Perkara Perdata*. Jurnal Hikmah. Vol. 15 (1).
- Taufik H. Takalao. 2017. *Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit Dalam Peradilan*. Lex Privatum.Vol. V (1).
- Tri Reni Novita, M. Faisal Husna. 2017. *Peranan Hakim Pengawas dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Medan Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU*. Kultura, Vol. 18 (1).
- Udin Silalahi, Beatrix Tanjung. 2021. *Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 4 (2).
- Zennia Almaida. 2021. *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Eletronik dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai*. Jurnal Privat Law Vol. 9 (1).
- Zulvia Makka. 2021. *Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason*. Jurnal Persaingan Usaha. Vol. 1 (2).

SKRIPSI/TESIS

- Alifah Zhecarina Kadang. 2021. *Tinjauan Yuridis Kepailitan akibat Pembatalan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 4 /Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 718 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Aria Sri Agustin. 2020. *Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi di Indonesia*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Bravika Bunga Ramadhani. 2009. *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan (Studi Kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang P.T. Prudential Life Insurance)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gde Oka Dharmawan Carma. 2018. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*. Skripsi. Universitas Atmajaya. Yogyakarta.
- Indri Wardianingsih. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Milik atas Tanah yang Tanahnya berasal dari Tanah Ulayat di Kota Jayapura (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 3057K/Pdt/2016)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Kholid Abdul Aziz. 2018. *Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Maranatha Purba. 2019. *Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Preventif terjadinya Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 137 K/PDT.SUS-PKPU/2014)*. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Ndaru Noer Prabowo. 2015. *"Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta"*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. Jember. hlm. 12.
- Oryza Ayu Nur Azizah. 2020. *Pembatalan putusan pengesahan perjanjian perdamaian yang telah di Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akibat Debitor Wanprestasi*. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Jember. Jember.
- Oscar Alexchandro Rajagukguk. 2022. *Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit Studi Putusan (Nomor 28/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Medan)*. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen. Medan.

Reza Fahlevi. 2022. *Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Septyana Wulandari. 2021. *Analisis Yuridis Tentang Likuiditas Perusahaan dalam Keterlambatan Klaim oleh AJB BUMIPUTERA terhadap Pemegang Polis ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo.

Wanda Meirdania Fitriyani. 2018. *Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran oleh Debitor*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Yogi Guntara. 2019. *Kajian Yuridis Penolakan Klaim Ganti Rugi oleh PT Asuransi Jiwa Manulife atas Dasar Perbedaan Identitas Tertanggung antara Polis dan Akta*. Skripsi. Universitas Pasundan, Bandung.

INTERNET

Arum Sutrisni Putri. 2020. *Jenis-Jenis Asuransi*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/12/070000069/jenis-jenis-asuransi>. Diakses pada 15 Agustus 2022.

Azarine Marsha Onassis. 2021. *Bolehkah Perjanjian Perdamaian Dibuat Menyimpang dari Putusan Pengadilan?*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perjanjian-perdamaian-dibuat-menyimpang-dari-putusan-pengadilan--lt60645258646d7#_ftn1. Diakses 9 April 2023.

Caesar Aidil Fitri. 2022. *Penerapan Asas Going Concern terhadap Usaha Debitur Pailit*. <https://siplawfirm.id/penerapan-asas-going-concern-terhadap-usaha-debitur-pailit/?lang=id>. Diakses 14 Mei 2023.

Dinlawgroup.com. 2021. *Mengenal Homologasi dalam Kepailitan*. <https://dinlawgroup.com/mengenal-homologasi-dalam-kepailitan/>. Diakses pada 12 Februari 2022.

Edukasinfo.com. 2020. *Macam-macam klasifikasi informan dalam penelitian kualitatif*. <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam.html>. Diakses pada 25 Februari 2022.

G.P. Aji Wijaya. 2002. *Peran Pengurus dalam Restrukturisasi Utang*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya>. Diakses pada 7 Agustus 2022.

Lifepal.co.id. 2018. *Asuransi Kresna Life*. <https://lifepal.co.id/asuransi/kresna-life/>. Diakses pada 17 Agustus 2020.

Rizky Dwinanto. 2019. *Asas Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-ibusiness-going-concern-i-dalam-kepailitan-dan-pkpu-lt5dca6acd70f86/#_ftn2. Diakses 14 Mei 2023.

Sorta Tobing. 2021. *Perjalanan Kasus Kresna Life, dari Gagal Bayar hingga berujung Pailit*. <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/60cc72dd9f62c/perjalanan-kasus-kresna-life-dari-gagal-bayar-hingga-berujung-pailit>. 18 Juni 2021. Diakses pada 17 Agustus 2022.

The Law Dictionary. What Is BANKRUPTCY?. Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. <https://thelawdictionary.org/bankruptcy/>. Diakses pada 24 Januari 2022

Tim Hukumonline. 2022. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. Diakses pada 1 Oktober 2022.

Wibi Pangestu Putra. 2021. *Kresna Life: Kami Sudah Mulai Bayar Klaim kepada Nasabah*. <https://finansial.bisnis.com/read/20210322/215/1370918/kresna-life-kami-sudah-mulai-bayar-klaim-kepada-nasabah>. Diakses pada 07 Januari 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgelijk Wetboek (BW).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU-II/2004 Nomor 001-002/PUU-III/2005.

Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Menteri Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim *Ad hoc*.

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Tel. : (0411) 3624058 Fax (0411) 3634667
Website : <https://www.pn-makassar.go.id> Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id, Pidana : pidana@pn-makassar.go.id,
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id,
PHI : phi@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 08 November 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 193 /PB.01/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

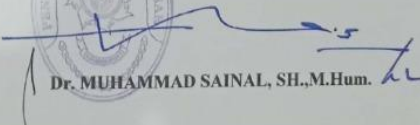
Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Muhammad Athallariq Gio Mulyadi.**
Nomor Pokok : B011181383
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Alamat : Jl. Sunu Komp. Unhas Blok AX/8B
Judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi Yang Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi (Putusan Nomor : 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 03 November 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 26 Oktober 2022 Nomor : 9407/UN4.5.1/PT.00/2022


WAKIL KETUA
Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang, Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

BENNY WULLUR & ASSOCIATES LAW FIRM

*Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2
Jln. Benjamin Suah Kav 6 A Kemayoran Jakarta Pusat*

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.KES., C.L.A., C.L.I., C.T.L., C.C.L.,
C.P.L., C.P.C.C.L.E., A.C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht.
Pekerjaan : Advokat dan Kurator Benny Wullur & Associates Law Firm

Dengan ini menerangkan yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Muhammad Athallariq Gio Mulyadi
No.Pokok : B01181383
Program : Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan

Telah melakukan penelitian berupa wawancara langsung pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022 terkait penelitian skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi Yang Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi (Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2022



**DR Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., C.L.A.,
C.L.I., C.T.L., C.C.L., C.P.L., C.P.C.C.L.E., A.C.I.Arb., C.P.T., C.H., C.Ht**

BENNY WULLUR & ASSOCIATES LAW FIRM
Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2

Halaman 1 dari 1

Perihal : Wawancara Mahasiswa untuk Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

di Makassar

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 7991/UN4.5.1/PT.00/2022 tertanggal 14 September 2022, Perihal Penelitian, pada prinsipnya saya tidak keberatan untuk membantu yang bersangkutan untuk memperoleh informasi terkait dengan tema skripsi. Mahasiswa Yang bersangkutan juga sudah mewawancarai saya melalui sambungan telpon.

Demikian, disampaikan terima kasih

Surabaya, 16 September 2022

Hormat Kami,



Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, SH, MH, CN

Guru Besar Hukum Kepailitan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

SURAT KETERANGAN

No : 061.B.INP-SKET.IX.2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imran Nating, S.H., M.H.**
Pekerjaan : - Managing Partner, Imran Nating & Partner Law Office;
- Ketua Umum Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia
(AKPI) Periode 2022-2025.

Dengan ini menerangkan yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Athallariq Gio Mulyadi**
No. Pokok : B011181383
Program : Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan
Studi/Bagian

Adalah benar telah melakukan penelitian berupa wawancara melalui telepon pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 terkait penelitian skripsi berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Telah Melaksanakan Prestasi Berdasarkan Homologasi yang Dibatalkan Melalui Putusan Kasasi (Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 27 September 2022

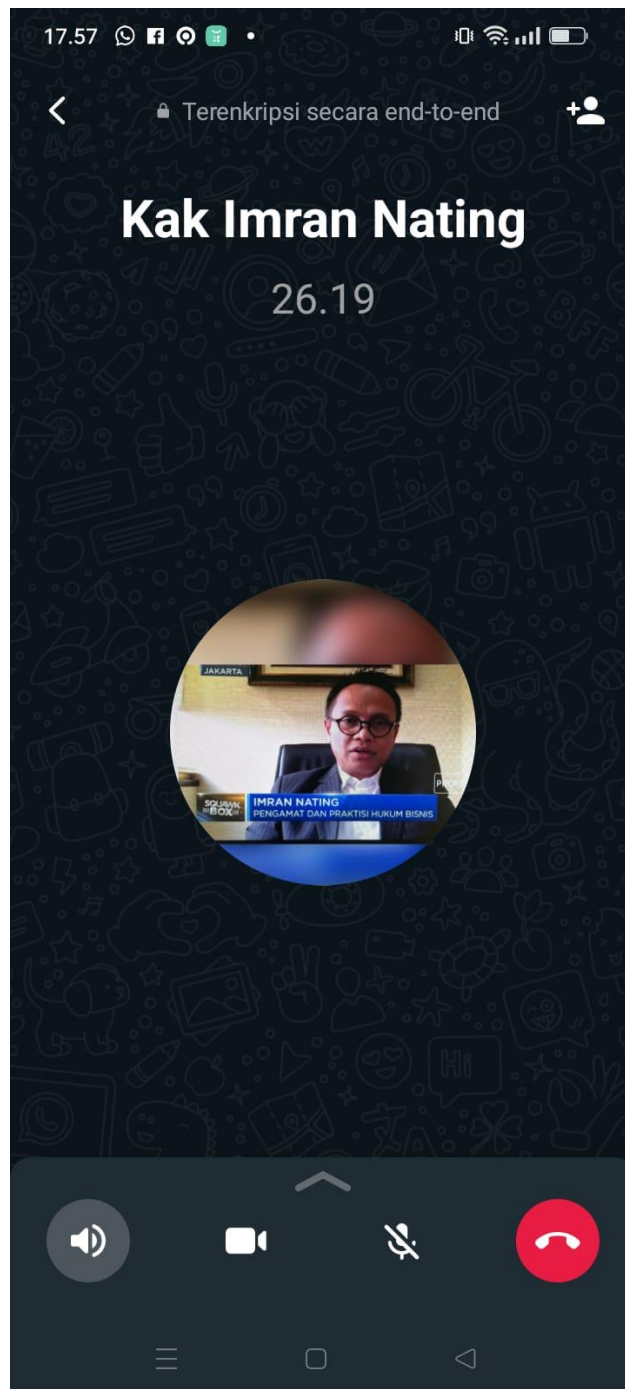
Imran Nating & Partners


INP **Imran Nating & Partners**
Advocates and Legal Consultants

Imran Nating, S.H., M.H.



Sesi wawancara dengan Pakar Hukum Kepailitan Sekaligus Guru Besar Hukum Kepailitan Universitas Airlangga Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. melalui telepon *Whatsapp*.



Sesi wawancara dengan Kurator dan Pengurus Sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia Kakanda Imran Nating, S.H., M.H. melalui telepon *Whatsapp*.



Sesi wawancara dengan Hakim Pengadilan Niaga Makassar Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. dengan berlokasi di Pengadilan Negeri Makassar.



Sesi wawancara dengan Kuasa Hukum Perwakilan Kreditor PT Asuransi Jiwa Kresna Bapak Dr. Benny Wullur, S.H., M.H. dengan berlokasi di Kantor Hukum Benny Wullur di Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2. Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6 Kemayoran, Jakarta Pusat.